



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Proyek Infrastruktur Pariwisata Kepulauan Seribu Mandek

**Pembangunan dianggap mengesampingkan kesejahteraan masyarakat.**

**Awit Hidayat**

awit.hidayat@tempo.co.id

**JAKARTA** — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu mengeluhkan mangkraknya pembangunan dua pulau dalam proyek pengembangan wisata Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Pergantian kontraktor penggarap diduga menjadi penyebab pengerjaan yang tak kunjung rampung.

"Iya, sempat mangkrak," kata Bupati Kepulauan Seribu, Husein Murad, kepada *Tempo*, kemarin.

Husein menjelaskan, proyek tersebut digarap oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selama dua tahun sejak 2017. Beberapa programnya adalah pembangunan drainase di permukiman Pulau Untung Jawa dan Pulau Tidung, infrastruktur pengolahan air limbah, fasilitas toilet

wisatawan, MCK komunal, penataan pedagang kaki lima, serta pengendalian sampah.

Pemerintah pusat menggenjot pembangunan infrastruktur di Pulau Tidung dan Pulau Untung Jawa, dua pulau dengan populasi penduduk terbanyak dan potensial dijadikan kawasan ekowisata di Kepulauan Seribu. Tapi Husein mengkritik proyek infrastruktur yang tak kunjung selesai, bahkan beberapa terbengkalai karena masalah kontraktor. Itu sebabnya, kata dia, Kabupaten Kepulauan Seribu bakal meminta penjelasan dari Kementerian Pekerjaan Umum.

Husein mengatakan masyarakat setempat dan wisatawan membutuhkan infrastruktur transportasi darat dan ke DKI Jakarta. Maka dia meminta pemerintah berfokus membenahi prasarana transportasi.

Direktur Jenderal



Husein Murad.

Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. Danis Sumadilaga, mengatakan belum tahu persis ihwal laporan mandeknya pembangunan infrastruktur pariwisata di Kepulauan Seribu. Bahkan dia menyatakan lupa berapa nilai proyek di sana. "Nanti saya cek karena saya enggak hafal (nilai proyek) satu per satu," ucap Danis ketika dimintai konfirmasi, kemarin.

Adapun Sri Hartoyo, Direktur Jenderal Cipta Karya sebelumnya, mengungkapkan bahwa tahun lalu dikucurkan anggaran sekitar Rp 50 miliar untuk masing-

masing wilayah pengembangan wisata di tujuh kawasan, yakni KSPN Borobudur KSPN Merotai, KSPN Labuan Bajo, KSPN Wakatobi, KSPN Kepulauan Seribu, KSPN Danau Toba serta KSPN Bromo-Tengger-Semeru. "Pembangunannya dilakukan bertahap," ucap dia, akhir tahun lalu.

Menurut dia, pembangunan difokuskan pada perbaikan jalan lingkungan, perbaikan drainase, penataan kawasan, persampahan, air bersih, limbah, dan ruang terbuka hijau.

Peneliti Senior Sajogyo Institute, Eko Cahyono, menyoroti konsep pembangunan KSPN. Dia menjelaskan pengembangan ekowisata justru semakin mengokohkan ketimpangan di Kepulauan Seribu. Hal itu terjadi karena tak ada legitimasi atas hak mereka di tengah pengembangan ekowisata KSPN yang berorientasi pada industrialisasi wisata dengan melibatkan perusahaan asing.

Pemerintah, Eko melanjutkan, berupaya mendapatkan lebih banyak devi-

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

# Proyek Infrastruktur Pariwisata Kepulauan Seribu Mandek

sa, tapi masyarakat menjadi korban ketimpangan sosial. Seharusnya, pengembangan ekowisata melibatkan masyarakat secara komunal

untuk kesejahteraan masyarakat. "Kalau dengan cara seperti ini (industrialisasi), siapa yang diuntungkan?"

## Salah Fokus Bisa Berujung Konflik

Penelitian Sajogyo Institute menemukan ketimpangan sosial dalam proyek pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Kepulauan Seribu. Pembangunan infrastruktur disinyalir hanya untuk kepentingan kelompok usaha yang berinvestasi di sana.

Peneliti senior Sajogyo, Eko Cahyo, mengatakan konsep ekowisata versi pemerintah pusat berfokus pada pembangunan infrastruktur tanpa melihat fakta adanya pemilik-pemilik pulau yang menguasai Pulau Seribu. "Pembangunan infrastruktur hanya untuk melayani kelompok pribadi," ucap dia kepada Tempo, kemarin.

Dia membedakan konsep pembangunan ekowisata di Kepulauan Seribu berpusat pada tiga hal, yakni atraksi di obyek wisata, amenities mengenai sarana penunjang ekowisata, serta aksesibilitas yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Masalahnya, pemerintah hanya menitikberatkan pada penyediaan aksesibilitas tanpa menyiapkan atraksi atau obyek yang bisa dijual bersama masyarakat.

Akibat dari salah fokus tersebut, pemerintah sering abai terhadap ketimpangan penguasaan dan kepemilikan pulau. Sajogyo Institute melihat Kepulauan Seribu telah menjadi private sector karena lahan dikuasai kelompok pribadi. Dalam proyek KSPN, pemerintah tak memperimbangan siapa yang diuntungkan dari program tersebut. Maka Eko khawatir pengembangan wisata akan berujung konflik di masyarakat.

• ANTI HINDIAT